

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 231-236
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12553064>

Etika Pemimpin Politik Dalam Islam dan Langkah Pencegahan Pelanggaran Etika

Nurul Hikmah Ramadhani Iskandar¹, Muh. Fajrin Kadri², Mohammad Sahrial Ramadhan³, Kurniati⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin
Email: 10200122015@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Etika pemimpin politik merupakan masalah utama yang terjadi dalam praktik politik, etika pemimpin politik ini juga penting dipahami oleh setiap orang agar kehidupan berpolitik dapat berjalan dengan adil dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menyikapi atau mengatasi etika pemimpin politik sebagai faktor atau sosok penting didalam sebuah pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait etika kepemimpinan politik dalam perspektif Islam dan upaya mencegah pelanggaran etika, selain itu metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif melalui sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya. Hasil temuan dari penelitian ini condong terhadap sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah yang menjadi contoh kepada umatnya yaitu: kejujuran, amanah, fathonah (cerdas), dan tablig. Dan juga etika politik yang di terapkan pada masa khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, serta pandangan ulama untuk beberapa kriteria etika yang perlu ada pada sosok pemimpin. Sejalan dengan itu juga memberikan contoh salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan hukum Islam pada masa kerajaan yang memberikan penerapan hukum sesuai dengan ajaran Islam atau prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya disambung dengan upaya pencegaham pelanggaran etika pemimpin menurut Islam yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan, pembentukan kode etik, pengawasan publik dan transparansi, dengan maksud agar semua orang menjadikan contoh untuk membawa menuju kesejahteraan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menambah pemahaman kepada semua orang terkait etika pemimpin dalam perspektif Islam.

Kata kunci: *Etika, Pemimpin, Politik*

Abstract

The ethics of political leaders is the main problem that occurs in political practice. It is also important for everyone to understand the ethics of political leaders so that political life can run fairly and with quality. Therefore, studies are needed to address or overcome the ethics of political leaders as an important factor or figure in a government. This research aims to find out more about the ethics of political leadership from an Islamic perspective and efforts to prevent ethical violations. Apart from that, the research method used is a descriptive analysis method through written sources such as journals, books and other sources. The findings from this research are biased towards the leadership traits of the Prophet who became an example to his people, namely: honesty, trustworthiness, fathonah (intelligent), and tabligh. And also the political ethics that were applied during the time of the caliph Salahuddin Al-Ayyubi, as well as the views of ulama on several ethical criteria that need to be present in a leader. In line with that, it also provides an example of one of the regions in Indonesia that implemented Islamic law during the kingdom period which provided for the application of law in accordance with Islamic teachings or Islamic principles. This is then continued with efforts to prevent violations of leadership ethics according to Islam, namely providing training and education, establishing a code of ethics, public supervision and transparency, with the aim that everyone will set an example to lead to prosperity and benefit. Therefore, this research was created to increase everyone's understanding regarding leader ethics from an Islamic perspective.

Keywords: *Ethics, Leaders, Politics*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Pemimpin politik memegang peran penting dalam membentuk kebijakan publik, memimpin masyarakat, dan memengaruhi arah perkembangan suatu negara. Oleh karena itu,

penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip etika yang harus dipegang oleh pemimpin politik dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Data menunjukkan bahwa terdapat berbagai kasus ketidakpatuhan etika oleh pemimpin politik di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi di tengah kepemimpinan politik yang kurang memperhatikan nilai-nilai etika Islam. Studi juga menunjukkan bahwa ketika pemimpin politik berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika Islam, hal itu dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, seperti peningkatan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial.

Pandangan pakar terbagi dalam pro dan kontra. Para pendukung mengatakan bahwa mengikuti etika Islam dalam kepemimpinan politik dapat memastikan integritas, keadilan, dan keadilan sosial yang lebih besar dalam sistem politik. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa penerapan etika Islam dalam politik dapat menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip sekuler dan dapat mengurangi pluralitas dalam masyarakat.¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi dan kebutuhan akan etika pemimpin politik dalam Islam, serta untuk mengidentifikasi cara-cara implementasi yang efektif. Manfaatnya termasuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan politik, memberikan panduan bagi pemimpin politik, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip etika Islam.

Penelitian sebelumnya telah menyelidiki isu-etika pemimpin politik dalam Islam, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman mendalam tentang penerapan serta upaya dalam mencegah pelanggaran etika pemimpin politik menurut nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi gap tersebut dengan menganalisis etika politik, penerapan etika dan langkah pencegahan pemimpin politik dalam konteks etika Islam. Penelitian ini dapat membantu dalam merumuskan panduan praktis bagi pemimpin politik untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam tindakan politik mereka. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat ketidakpatuhan etika dan meningkatkan kualitas kepemimpinan politik dalam masyarakat Muslim maupun non-Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi penelitian analisis deskriptif, pada dasarnya, melibatkan pengumpulan data yang mencerminkan realitas, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang sedang diteliti. Informasi atau data dikumpulkan melalui telaah dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Etika Politik

Istilah etika, berasal dari bahasa Yunani kuno. Dalam bentuk tunggal, kata Yunani *ethos* mempunyai banyak arti, yakni: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Arti terakhir inilah, yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah ‘etika’, yang oleh Aristoteles (384-322 SM) – filosof besar Yunani – sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Dari arti etimologis etika di atas, maka etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Sedangkan secara terminologis sebagaimana diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika dapat digolongkan menjadi tiga pengertian: 1) Ilmu tentang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak). 2) Seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas; 3) Nilai-nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh kelompok dan masyarakat.² Adapun pandangan para ahli lainnya yang mendefinisikan etika sebagai berikut:

¹Dewi Dahlan, “*Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)*”, Menara Ilmu 15, no. 1 (2021): 42–50.

²Menteri Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, 2017.

1. Plato mendefinisikan etika sebagai keterampilan untuk mencapainya tujuan tertinggi manusia dari pemikiran, perilaku moral, dan kebajikan manusia. Adapun, tujuan tertinggi tersebut adalah kebahagiaan dan kesejahteraan.³
2. Menurut Bartens, ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.⁴

Sementara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri seperti:

1. Menurut Hamzah Ya'kub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk.
2. Menurut Amin etika/akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁵

Selanjutnya, istilah politik biasa menunjukkan pada masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan dianggap bersifat politis, apabila keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat keseluruhan. Suatu tindakan disebut politis, apabila menyangkut masyarakat secara keseluruhan. Politisi adalah seseorang yang mempunyai profesi mengenai masyarakat sebagai keseluruhan.⁶

Sedangkan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata politik diartikan sebagai berikut; 1) Ilmu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintah) 2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain dalam dan luar negeri. Kedua negara itu bekerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan, partai atau organisasi 3) Kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani masalah).⁷

Dalam bahasa arab, kata politik biasa disebut dengan al-siyâsah. Al-siyâsah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja sâsa-yasûsu, yang pelakunya disebut sâ'is. Secara etimologis, kata al-siyâsah dapat berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyâsah juga bisa berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan.

Secara terminologis, siyâsah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan atau membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyâsah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum berdasarkan keadilan dan istiqamah. atau mudahnya, siyâsah artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemashlahatan, mengatur dan menangani urusan rakyat dan mendatangkan kemashlahatan bagi mereka.⁸

Dari berbagai definisi etika dan politik yang ada di atas, maka dapat dikatakan bahwa etika politik merupakan kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak, untuk mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan. Dan etika politik juga merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.

Penerapan Etika Pemimpin Politik dalam Islam

Jika bicara kepemimpinan dalam pandangan Islam, maka itu akan tertuju dan tidak lepas dari sosok Rasulullah sebagai role model kepemimpinan yang sudah dicontohkan beliau ketika menjadi Rasul dan sekaligus pemimpin umat Islam. Dalam Islam, agama, moral dan elemen spiritual mendominasi kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan sudah sangat familiar bagi seorang

³Silmi Nurul Utami, "Definisi Etika Menurut Para Ahli", kompas.com, 2023.

⁴Ihsan Karo Karo, "Konsep Etika Peserta Didik Menurut Burhanuddin Al-Zarnuji", 2018, 1-10.

⁵Muhammad Alfian, "Filsafat Etika Islam", 01 (2016): 29-30.

⁶Muh. In'amuzzahidin, "Etika Politik Dalam Islam", Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 2, no. 2 (2016): 89.

⁷Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.

⁸Aan Supian, *Etika Politik Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Hadis, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, vol. 09, 2019.

muslim bahwa ada empat sifat kepemimpinan yang berhubungan dengan Rasulullah, yaitu al sidq, amanah, fathonah dan tabligh. Empat sifat kepemimpinan Rasulullah SAW itu sebagai cerminan bagian dari indikator apakah seorang pemimpin itu sudah mencotoh kepemimpinan Rasulullah atau belum. Sehingga hal ini menjadi kunci penting dalam menjalankan kepemimpinan untuk menerapkan sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah dengan seksama. Berikut di bawah ini empat sifat kepemimpinan Rasulullah:

a. Al-Sidq (Jujur)

Al-sidq adalah konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Seorang pemimpin harus selalu berkata yang sebenarnya dari dasar hati, dan menunjukkan ketenangan dalam jiwa, serta kekhawatiran dalam melakukan kebohongan dasar dari sifat Al-Sidq adalah Al-Qur'an surat Al-Najm, 53: 4-5 yang menyatakan bahwa "Dia tidak mengucapkan Al-Qur'an atas keinginannya sendiri, Al-Quran dari Allah kepadanya melalui Jibril yang datang dan membacakannya kepadanya, dan mengajarnya".

b. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. Menurut Daud et all. (2014) menyatakan bahwa amanah adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan menekankan sebuah tanggung jawab terhadap stakeholder organisasi. Contoh terbaik dari pemimpin amanah adalah Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-A'raf. 7:68 yang berbunyi "Saya menyampaikan kepada Anda pesan-pesan Tuhanku dengan menjelaskan perintah dan larangan (dan bagi Anda penasihat sejati) yang memperingatkan Anda tentang siksaan Allah dan memanggil Anda untuk bertobat dan beriman, dan Saya dapat dipercaya dalam menyampaikan pesan Tuhanku. Dikatakan juga bahwa: Anda dulu menganggap Saya orang yang bisa dipercaya, jadi bagaimana mungkin Anda sekarang menuduh Saya".

c. Fathonah (Cerdas)

Fathonah memiliki makna cerdas atau memiliki pengetahuan yang baik. AlQur'an menjelaskan tentang pemimpin fathanah pada surat Fatir. 35: 28 yang berbunyi "Mereka yang benar-benar takut kepada Allah (SWT), di antara hamba-Nya, yang memiliki pengetahuan, karena Allah (SWT) ditinggikan dalam memaafkan".

d. Tablig

Tablig memiliki makna menyampaikan, dan ini berkenaan dengan komunikasi, sehingga dalam memimpin bawahan dibutuhkan untuk mengkomunikasikan tujuan dari misi dan menginspirasi pengikut untuk mengikutinya. Sehingga seorang pemimpin butuh keterampilan dalam berkomunikasi agar pemimpin bisa mengakulturasikan ide idenya dan bisa dipahami oleh para pengikutnya. Al-Qur'an menjelaskan pentingnya komunikasi (tablig) bagi seorang pemimpin yaitu pada surat Al-Jinn, 72:28 yang berbunyi "Utusan, Muhammad dan utusan lainnya, tahu bahwa para malaikat telah menyampaikan pesan dari Allah sehingga jin dan manusia tahu bahwa utusan telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan mereka. Dia memiliki pengetahuan penuh tentang semua malaikat yang mengelilingi mereka, (dan Dia terus menghitung semua hal) dikatakan juga bahwa Dia mengetahui jumlah mereka sama seperti Dia mengetahui keadaan orang yang terbungkus dalam pakainya".⁹

Dengan demikian kepemimpinan etis dalam pandangan Islam mengacu kepada sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah yang dicontohkan beliau kepada umatnya yakni, al-Sidq, amanah, fathonah dan tablig. Namun selain itu penulis juga menyajikan kepemimpinan etis pada masa Ayubiyah yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin al-Ayyubi, yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah atau sultan yang menjadikan sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah sebagai referensinya dalam menjabat sebagai sultan pada saat itu Mesir dan Suriah. Berikut ini empat sifat kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi :

a. Sidiq (Jujur)

Salahuddin sangat menghargai kejujuran dan selalu menepati janji, bahkan ketika lawan-lawannya memanfaatkan hal itu untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Ia juga sangat mencintai jihad di jalan Allah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di medan jihad.

⁹Zaedun Na'im, "Etika Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Korelasinya Terhadap Kinerja", Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 6, no. 1 (2022), h. 202-203.

Bahkan ketika sedang tidak sehat, kadang ia tetap memimpin pasukannya menghadapi musuh. Ia juga meminta para ulama untuk menuliskan buku-buku tentang jihad.

b. Amanah

Ibnu Jubair menyebutkan, di antara kebajikan Salahuddin dan jejak peninggalan yang mengharumkan namanya di mata agama maupun dunia, bahwa ia telah menghapuskan pungutan dan pajak yang telah dibebankan kepada rakyat atas setiap transaksi jual beli yang mereka lakukan, besar maupun kecil, sampai-sampai meminum air sungai Nil pun dimintai pungutan; maka Salahuddin telah menghapuskan semua itu.

c. Tablig

Mesir sendiri dapat lepas dari rezim Fathimiyah yang beraliran Syia'ah, dan melalui tangan Shalah al-Din, Sunni berkembang pesat di negeri ini.

d. Fathanah (Cerdas)

Kecerdasan Salahuddin tidak diragukan dalam Menyusun strategi perang terutama dan dalam pemerintahan. Terutama dalam merebut kembali baitul maqdis, walaupun ada wilayah lain sebagai tukar tempat dengan baitul maqdis.

Peristiwa berikut ini merupakan contoh kelihaihan taktik salahuddin. Pada suatu saat Reynald de Chatillon, salah seorang kesatria pasukan salib telah menyerang seombongan jamaah haji ke Mekah. Kemudian salahuddin melakukan pembalasan dengan jalan menyerbu istana Reynald saat diselenggarakan pesta perkawinan di dalam istana. Sekaligus dengan cara itu dia dapat menghukum kaum Fathimiyah yang tidak menyukainya, yang sedang menghadiri pesta tersebut. Konon banyak dari mereka terbunuh dengan serangan balas dendam itu, termasuk para penyair dan keluarga istana.¹⁰

Adapun beberapa pendapat ulama terkait kepemimpinan yang secara eksplicit mencerminkan empat sifat di atas, sebagaimana berikut :

- a. Ibnu Abi Rabi' menambahkan syarat kepribadian seorang pemimpin (siyasat nafsih). Ia menambahkan sembilan kriteria yang dimiliki pribadi pemimpin, yaitu pandai membagi waktu, bijaksana, teladan, tidak bahagia terhadap pujian, tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, pandai bersyukur, mempunyai intuisi yang baik, menempatkan kebenaran dan keadilan di depan, serta membalas kesalahan orang lain dengan kebaikan.
- b. Menurut Ibn Al Farabi ada 12 karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu (1) anggota badan yang sempurna; (2) pemahaman dan daya hafalan yang baik; (3) intelektualitas yang tinggi; (4) pandai mengemukakan pendapat dan uraiannya mudah dimengerti; (5) mencintai pendidikan; (6) tidak tamak dalam hal-hal yang bersifat materi; (7) mencintai kebenaran; (8) berjiwa besar; (9) tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan dunia; (10) mencintai keadilan dan membenci keburukan; (11) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan; serta (13) mempunyai pendirian yang kuat atau istiqomah.
- c. Al Mawardi berpendapat seorang pemimpin harus mampu mewujudkan kelangsungan enam sendi utama (1) agama yang dihayati, (2) pemimpin yang berwibawa, (3) keadilan yang menyeluruh, (4) keamanan semesta, (5) kemakmuran sandang-pangan, dan (6) harapan kelangsungan hidup.¹¹

Sejalan dengan penerapan etika pemimpin politik yang sudah di uraikan diatas dari masa Rasulullah, Khalifah dan pandangan ulama. Ternyata, indonesia juga termasuk negara yang banyak menerapkan hukum Islam termasuk nilai-nilai, moral, dan etika. Berikut ini salah satu contoh pada wilayah indonesia yang menerapkan nilai-nilai hukum Islam pada masa kerajaan di indonesia:

Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu wilayah yang ada di indonesia didirikan oleh Sultan Ali Mughiyah Syah (Sultan Ibrahim) pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam dicapai ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Sultan Iskandar Muda sangat ketat menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan "Qanun Meukuta Alam". Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati/rajam hingga larangan riba.

Syaikhul Islam memiliki kewenangan memimpin keagamaan termasuk membuat kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Syaikhul Islam Nuruddin ar-Raniry (1637-

¹⁰M. Hamdani, "Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Sosok Shalahuddin Al-Ayyubi", 2016, h. 85-88.

¹¹Na'im, "Etika Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Korelasinya Terhadap Kinerja", h. 206-207.

1641) membuat beberapa kitab pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara. Penerapan hukum Islam di kerajaan Aceh Darussalam menyatu dengan peradilan negara yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat pertama/kampung dipimpin oleh Keucik, ia berwenang atas perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Mukim. Adapun peradilan tingkat kedua (peradilan banding) disebut Oeloebalang, apabila putusan Oeloebalang dirasa tidak memuaskan maka bisa ditempuh banding kepada peradilan ketiga yaitu Panglima Sagi.

Keputusan Panglima Sagi dapat dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari atas Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara, dan Faqih/Ulama.¹²

Itulah di atas beberapa penerapan nilai-nilai, moral dan etika pemimpin politik dalam perspektif Islam. Mulai dari penerapan yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW., masa salah satu Khalifah terkenal dalam Islam, dan pandangan ulama serta penerapan nilai-nilai, moral dan etika yang di terapkan di Indonesia pada masa kerajaan. Hubungan antara sikap kepemimpinan dengan etika ini sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kemajuan dan keberhasilan maupun kegagalan dari suatu negara/organisasi yang berdominan dari pada seorang pemimpin itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membahas terkait hubungan kepemimpinan dengan etika, yang menjelaskan bahwa hubungan antara sikap kepemimpinan dengan etika ini sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kemajuan dan keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi yang berdominan dari pada seorang pemimpin itu sendiri. Tidak lupa pula bahwasanya yang menjadikan faktor penentu itu sendiri ialah pemimpin yang membangun kejayaan dari suatu organisasi.¹³

Pencegahan Pelanggaran Etika oleh Pemimpin Politik Menurut Nilai-Nilai Islam

Mencegah pelanggaran etika oleh pemimpin politik dengan mengacu pada nilai-nilai Islam memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam serta penerapannya dalam konteks kepemimpinan politik. Berikut adalah langkah-langkah pencegahan pelanggaran etika oleh pemimpin politik menurut nilai-nilai Islam:

a. Mengadakan pelatihan dan pendidikan

Kepemimpinan pendidikan Islam adalah kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, menggerakkan, melatih, memerintah, mengatur agar organisasi dapat berjalan dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan yang berdasarkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan pendidikan kepemimpinan yaitu berfungsi sebagai seseorang yang mampu mengatur dan menciptakan perubahan yang efektif dan menggerakkan organisasi agar mau mengerjakan apa yang telah dikehendaki bersama serta meningkatkan kualitas dari calon pemimpin tersebut.¹⁴

b. Pembentukan kode etik

Menurut Suwarno kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Untuk itu perlu mengembangkan kode etik atau piagam moral yang mengikat bagi pemimpin politik berdasarkan ajaran Islam.¹⁵

c. Hisbah (kontrol sosial/pengawasan publik) dan transparansi

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya (Alquran 28: 26). Janganlah kamu memperhatikan banyaknya salat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat (Nabi Muhammad saw, Bihar al-Anwar 75: 114). Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli ushul fiqh lagi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak akan berjalan tanpanya.

¹²Soeparmono, Abdul Rahman, and Kurniati., "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi", no. 2 (2022), h. 88-89.

¹³Indah Arista Putri, "Hubungan Antara Sikap Kepemimpinan Dengan Etika Organisasi: Suatu Tinjauan", no. 1 (2020): h. 339-340.

¹⁴Utari Langeningtias, Nidya Ulfah, and Ana Novitasari, "Kepemimpinan Pendidikan Menurut Prespektif Al-Qur'an", Jurnal Pendidikan Indonesia 2, no. 8 (2021), h. 484-485.

¹⁵Maizuar Effendi et al., "Kode Etik dan Profesionalisme Pustakawan" 2014, h. 4.

Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi. Walhasil, dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan saja mengantarkan manusia pada berbagai kebajikan, tetapi juga mengantarkan mereka kepada surga yang dijanjikan.¹⁶

Dari ketiga macam upaya pencegahan pelanggaran etika oleh pemimpin politik menurut nilai-nilai Islam dapat disimpulkan ketiga macam tersebut sangatlah penting agar mencegah terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemimpin. Namun, dari ketiga langkah diatas perlu juga kesadaran yang mendalam dari diri sendiri agar menerapkan hal-hal kecil yang berpengaruh baik agar terhindar dari pelanggaran etika politik.

SIMPULAN

Etika dalam konteks kepemimpinan politik menurut Islam memiliki landasan yang kuat dari ajaran Al-Qur'an dan teladan Rasulullah SAW. Etika politik merupakan aspek krusial dalam kepemimpinan, baik dalam perspektif umum maupun khususnya dalam Islam. Dalam pandangan Islam, etika politik mencakup nilai-nilai moral yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti jujur (al-sidq), amanah, cerdas (fathonah), dan kemampuan berkomunikasi yang baik (tabligh). Penerapan nilai-nilai ini sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas kepemimpinan. Selain itu, sejarah dan praktik di kerajaan-kerajaan Islam, seperti pada masa Sultan Salahuddin al-Ayyubi dan kerajaan Aceh Darussalam, menunjukkan bahwa penerapan etika kepemimpinan yang baik dapat membawa kemajuan dan stabilitas. Oleh karena itu, kepemimpinan yang beretika tidak hanya mempengaruhi keberhasilan individu pemimpin tetapi juga menentukan keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji dampak spesifik dari penerapan etika politik Islam pada keberhasilan kebijakan publik dan stabilitas politik di berbagai negara mayoritas Muslim. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa fokus pada pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan penerapan etika politik oleh para pemimpin.

REFERENSI

- Alfan, Muhammad. "Filsafat Etika Islam" 01 (2016).
- Dahlan, Dewi. "Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)." *Menara Ilmu* 15, no. 1 (2021).
- Effendi, Maizuar, S Pd, Pustakawan Madya, and Universitas Negeri Padang. "Kode Etik dan Profesionalisme Pustakawan," 2014.
- Hamdani, M K. "Nilai-Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Sosok Shalahuddin Al-Ayyubi.," 2016.
- Soeparmono, Abdul Rahman, and Kurniati., "*Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi*", no. 2 (2022).
- Ihsan Karo Karo. "Konsep Etika Peserta Didik Menurut Burhanuddin Al-Zarnuji," 2018.
- Muh. In'Amuzzahidin. "Etika Politik Dalam Islam." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 2 (2016).
- Langeningtias, Utari, Nidya Ulfah, and Ana Novitasari. "Kepemimpinan Pendidikan Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 8 (2021).
- Na'im, Zaedun. "Etika Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Korelasinya Terhadap Kinerja." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022).
- Nasional, Menteri Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI). Экономика Региона*, 2017.
- Putri, Indah Arista, Agus Sujono, Sendy Elsa Nova, Program Studi, and Ilmu Pemerintahan. "Hubungan Antara Sikap Kepemimpinan Dengan Etika Organisasi : Suatu Tinjauan" 2, no. 1 (2020).
- Rakyat, Pikiran. "Transparansi Dalam Perspektif Islam."
- Supian, Aan. *Etika Politik Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Hadis. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 09, 2019.
- Utami, Silmi Nurul. "Definisi Etika Menurut Para Ahli." *kompas.com*, 2023.

¹⁶Pikiran Rakyat, "Transparansi Dalam Perspektif Islam", 2004.